

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 999
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BENDAHARA UMUM NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
		999.01	BA BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH	155.730.658
		01	PELAYANAN UMUM	155.730.658
		999.01.06	Program Pengelolaan Utang Negara	155.730.658
			4061 Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Utang	155.730.658
			Pembayaran Bunga Utang	155.730.658
			1. Dalam Negeri	141.203.758
			2. Luar Negeri	14.526.900
			a. Pembayaran bunga pinjaman luar negeri	14.326.900
			b. Transaksi lindung nilai (<i>hedging</i>)	200.000
		999.02	BA BUN PENGELOLAAN HIBAH	4.644.428
		01	PELAYANAN UMUM	4.644.428
		999.02.07	Program Pengelolaan Hibah Negara	4.644.428
			4062 Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Hibah	4.644.428
			A. Hibah kepada Pemerintah Daerah	4.621.727
			I. Pinjaman Luar Negeri Yang Diterushibahkan	2.759.848
			1. <i>Mass Rapid Transit (MRT) Project</i>	2.583.030
			2. <i>Water Resources and Irrigation Sector Management Project-Phase II (WISMP-2)</i>	176.818
			II. Hibah Luar Negeri Yang Diterushibahkan	1.361.879
			1. Hibah Air Minum	411.520
			2. Hibah Air Limbah	41.975
			3. <i>Development of Seulawah Agam</i>	54.571
			4. Hibah Australia- Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi	334.640
			5. <i>Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)</i>	284.600
			6. Hibah <i>Microfinance Innovation Fund</i>	97.073
			7. Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal (PKP-SPM) Pendidikan Dasar	137.500
			III. Penerimaan Dalam Negeri Yang Dihilahkan	500.000
			1. <i>Nationwide Water Hibah Program</i>	500.000
			B. Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing	22.501
			1. Hibah Pembangunan Masjid di Ahmad Shah Baba Mina, Kabul Afghanistan	5.000
			2. Hibah Pembangunan Masjid di Queensland, Australia	5.000
			3. Hibah kepada Pemerintah Palau	12.501
			C. Belanja Terkait Pendapatan Hibah	200
			1. Belanja Terkait Pendapatan Hibah (<i>Banking Commission</i>)	200
		999.07	BA BUN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI	212.104.385
		01	PELAYANAN UMUM	212.104.385
		999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi	212.104.385
			4069 Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Subsidi	212.104.385
			A. <i>ENERGI</i>	137.824.036
			1. Subsidi BBM, LGV dan LPG 3 Kg	64.674.799
			a. Subsidi TA Berjalan	44.407.799
			b. Kekurangan Pembayaran TA sebelumnya	33.022.074
			c. <i>Carry over</i> ke TA berikutnya	(12.755.074)
			2. Subsidi Listrik	73.149.237
			a. Subsidi TA Berjalan	66.149.237
			b. Kekurangan Pembayaran TA sebelumnya	7.000.000
			B. <i>NON ENERGI</i>	74.280.349
			1. Subsidi Pangan	18.939.930
			2. Subsidi Pupuk	39.475.696
			a. Subsidi Harga	28.565.960
			b. Kekurangan Pembayaran Tahun 2013	7.272.608
			c. Kekurangan Pembayaran Tahun 2012	3.637.128
			3. Subsidi Benih	939.413
			4. PSO	3.261.270
			a. PT KAI	1.523.757
			b. PT Pelni	1.607.195
			c. Perum LKBN Antara	130.318

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 999
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BENDAHARA UMUM NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
			5. Subsidi Bunga Kredit Program	2.484.041
			a. Kredit Likuiditas BI (eks Pola KLBI)	2.997
			b. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)	275.311
			c. Risk Sharing KKP-E	348
			d. Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPENRP)	115.639
			e. Kredit Pemberdayaan Pengusaha NAD dan Nias	147
			f. Imbal Jasa Penjaminan KUR	2.043.782
			g. Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)	32.454
			h. Skema Subsidi Resi Gudang	1.027
			i. Subsidi Bunga Untuk Air Bersih	12.336
			6. Subsidi Pajak	9.180.000
			a. Subsidi Pajak Penghasilan	8.180.000
			1) PPH atas Komoditas Panas Bumi	2.190.000
			2) PPH atas bunga, imbal hasil dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional (tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal)	5.990.000
			b. Fasilitas Bea Masuk	1.000.000
			999.08 BA BUN PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA	50.147.592
			01 PELAYANAN UMUM	50.147.592
			999.08.12 Program Pengelolaan Belanja Lainnya	50.147.592
			4070 Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Anggaran Lainnya	50.147.592
			A. Belanja Pegawai	14.501.127
			1. Gaji dan Tunjangan	471.675
			Cadangan Anggaran Gaji untuk Tambahan Pegawai Baru	471.675
			2. Honorarium, Vakasi, dan Lain-Lain	14.029.452
			Honorarium Tunjangan Khusus dan Pegawai Transito	14.029.452
			B. Belanja Bantuan Sosial	4.000.000
			1. Dana Cadangan Bencana Alam	4.000.000
			a. Dana <i>On Call</i>	2.500.000
			b. Dana Cadangan Penanggulangan Bencana	1.500.000
			C. Belanja Lain-Lain	31.646.465
			1. Cadangan Risiko	9.633.717
			a. Cadangan Risiko Fiskal	5.393.717
			b. Cadangan Stabilisasi Harga Pangan dan Ketahanan Pangan	2.000.000
			c. Cadangan Risiko Kenaikan Harga Tanah (<i>Land Capping</i>)	2.240.000
			2. Operasional Lembaga yang Belum Mempunyai BA	172.600
			a. Kawasan Bintan dan Karimun	72.600
			b. Kawasan Otorita Asahan	100.000
			3. Ongkos Angkut Beras PNS di Distrik Pedalaman Papua	98.300
			a. Provinsi Papua	87.180
			b. Provinsi Papua Barat	11.121
			4. Cadangan Beras Pemerintah	1.500.000
			5. Cadangan Benih Nasional	44.000
			6. Cadangan Keperluan Mendesak	4.052.428
			7. Cadangan Selisih Kurs	500.000
			8. Cadangan Dana Dukungan Kelayakan / <i>Viability Gap Fund</i>	1.000.000
			9. Bantuan Operasional Layanan Pos Universal	338.500
			10. Cadangan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) Kemenhan	4.500.000
			11. Cadangan Kepesertaan PBI JKN	1.384.626
			12. Dana untuk Kegiatan Operasional OJK	1.745.300
			13. Dana Operasional Kegiatan SKK Migas	1.900.000
			14. Cadangan <i>Reward</i> Kementerian/Lembaga	62.843
			15. Kekurangan Pembayaran <i>Outstanding</i> Biaya Konversi Minyak ke LPG Tahun 2007 - 2012	2.714.150
			16. Cadangan untuk Perubahan Nomenklatur Kementerian/Lembaga	500.000
			17. Cadangan Badan Ekonomi Kreatif	1.500.000

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 999
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BENDAHARA UMUM NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
		999.99	BA BUN PENGELOLAAN TRANSAKSI KHUSUS	101.441.510
		01	PELAYANAN UMUM	101.441.510
		999.99.13	Program Pengelolaan Transaksi Khusus	101.441.510
			4071 Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Transaksi Khusus	101.441.510
			A. Belanja Pegawai	101.112.217
			1. Kontribusi Sosial	101.112.217
			a. Anggaran Manfaat Pensiun (PT TASPEN)	80.666.847
			b. Anggaran Manfaat Pensiun (PT ASABRI)	11.238.436
			c. Jaminan Pelayanan Kesehatan	5.304.290
			d. Cicilan UPSL Program THT (PT TASPEN)	3.000.000
			e. Cicilan UPSL Program THT (PT ASABRI)	375.000
			f. Jamkesmen	56.775
			g. Jamkestama	56.775
			h. IWP Program Jaminan Kecelakaan Kerja	183.330
			i. IWP Program Jaminan Kematian	230.765
			B. Belanja Barang	311.866
			1. <i>Trust Fund</i> dan Kontribusi ke Lembaga Internasional	57.728
			a. <i>USAID Trust Fund</i>	15.000
			b. <i>Islamic Solidarity Fund for Development (ISFD)</i>	32.500
			c. <i>OPEC Fund for International Development (OFID)</i>	2.470
			d. <i>ASEAN +3 Macroeconomic and Research Office (AMRO)</i>	6.046
			e. <i>Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)</i> <i>BEPS Project</i>	833
			f. <i>OECD Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (GFTEI)</i>	488
			g. <i>ASEAN Mineral Trust Fund (AMTF)</i>	390
			2. Dana Dukungan Kelayakan / <i>Viability Gap Fund (VGF)</i>	151.839
			a. SPAM Umbulan	14.457
			b. SPAM Lampung	137.382
			3. Penugasan PT SMI atas Fasilitas Penyiapan Proyek KPS Kereta Api Bandara Soekarno Hatta - Manggarai dan Proyek KPS SPAM Umbulan	102.299
			C. Belanja Lain-lain	17.428
			Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	17.428

*) Tidak terdapat dalam Pagu APBN 2014.

**) Pagu DIPA Penerusan Pinjaman TA 2014 sebesar Rp3.480.286.290.000,00, karena terdapat tambahan berupa lanjutan penerusan pinjaman TA 2013 sebesar Rp2.254.008.360.000,00.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya,
 SEKRETARIAT KABINET RI
 Deputi Bidang Perekonomian,

Ratih Nurdiati